

**PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN KARAWANG
ANALISIS TERHADAP STRATEGI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARAWANG**

Rachmat Ramdani¹⁾, Sopyan Resmana Ardiarsa²⁾

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.

Korespondensi Penulis. E-mail: rachmat.ramdani@unsika.fisip.ac.id , Telp:
+6281386291388

Abstrak

Jurnal ini menganalisis strategi program keluarga berencana pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Karawang. Pelaksanaan program KB di Kabupaten Karawang dihadapkan pada tantangan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan yang signifikan dipengaruhi oleh faktor arus urbanisasi yang tidak dapat dikendalikan jumlah pendatang dari luar mencapai angka 60% sementara penduduk asli Kabupaten Karawang 40%. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan dan analisis data secara mendalam untuk menganalisis bagaimana strategi program keluarga berencana yang diselenggarakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi program KB di DPPKB Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari aspek faktor strategi dalam program KB di Kabupaten Karawang memiliki landasan mandat organisasi dan indentifikasi misi dalam menentukan kejelasan tujuan, faktor internal dari SDA dan anggaran memiliki dukungan dan komitmen dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Karawang sedangkan faktor lingkungan eksternal aspek politik dan sosial menjadi kendala dalam pelaksanaan program KB belum memiliki kebijakan dalam pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi.

Kata kunci: Program KB, DPPKB Kabupaten Karawang, Perencanaan Strategis

Abstract

This journal analyzes the strategy of the family planning program for the growth of occupation in Karawang Regency. The implementation of family planning programs in the Karawang regency faced with the challenge of population growth in the Karawang regency experienced a significant increase influenced by the factor of urbanization that could not be controlled by the number of outsiders reaching 60% while the original population of Karawang regency was 40%. Using qualitative methods, in-depth data collection and analysis to analyze how the family planning program strategy is implemented by the Karawang Regency DPPKB. The results showed that the strategy of the KB program in the DPPKB Karawang regency had been running well can be seen from the aspect of strategic factors in the KB program in the Karawang regency has a foundation of organizational mandate and mission identification in determining the clarity of objectives, internal factors of the SDA and the budget has support and commitment in the implementation of family planning programs in the Karawang regency while external environmental factors political and social aspects become obstacles in the implementation of family planning programs do not yet have a policy in population growth caused by urbanization.

Keywords: Family Planning Program, DPKKB Karawang Regency, Strategic Planning

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dunia, akan mengalami bonus demografi di tahun 2025, bonus demografi tersebut apabila tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maka menimbulkan permasalahan kependudukan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial. Dampak lainnya dari permasalahan kependudukan yang diakibatkan dari bonus demografi berdampak pada mutu kualitas penduduk sumber daya manusia yang tidak terkontrol. Pemerintahan Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, moralitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Hasil proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 265 juta jiwa yang terdiri dari 133,7 juta laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.

Data hasil dari proyeksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan selanjutnya mengategorikan yang berdasarkan pada kelompok umur penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Kategori usia produktif (14-64 tahun) mencapai 179,13 juta jiwa (67,6%), kemudian usia lanjut 65 tahun ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%). Berdasarkan hasil proyeksi BPN tersebut menyebutkan bahwa jumlah kelahiran tahun 2018 mencapai 4,81 juta jiwa sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa. Dari data hasil proyeksi tersebut terlihat rasio angka ketergantungan antara usia produktif dan usia non produktif sebesar 47,9 %.

Kabupaten Karawang memiliki potensi yang cukup signifikan dari segi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkembang di Kabupaten Karawang ditunjang oleh kawasan industrialisasi, kawasan industri tersebut memberikan daya tarik bagi para investor menanamkan modal untuk pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Karawang. Geliat pembangunan di Kabupaten Karawang yang dulu terkenal sebagai Kota Lumbung Padi memberikan dampak pada perubahan secara menyeluruh bagi masyarakat Karawang. Kabupaten Karawang dengan segala potensi strategis yang dimilikinya menjadi modal dan kekuatan untuk menjadikan Kabupaten Karawang berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi saat ini, Kabupaten Karawang mengalami peningkatan arus urbanisasi yang tidak dapat dikendalikan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan jumlah pendatang dari luar Kabupaten Karawang mencapai angka 60% dari keseluruhan jumlah penduduk Karawang, sementara penduduk asli Kabupaten Karawang mencapai 40%. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2,9 juta jiwa, sementara jumlah pendatang sekitar 1,7 juta jiwa.

Data lonjakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang arus urbanisasi secara signifikan terjadi sejak tiga tahun lalu. Disdukcapil Kabupaten Karawang mencatat pada tahun 2016 sekitar 30.000 urbanisasi tinggal di Karawang, kemudian di tahun 2017 bertambah sekitar 1.000 orang pada tahun 2018 sekitar 11.600 orang datang ke Kabupaten Karawang. Selain data lonjakan arus urbanisasi yang terus meningkatkan dari Disdukcapil, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang juga mencatat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tertera dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karawang Periode 2010-2015

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2010	1,102,825	1,041,360	2,144,185
2	2011	1.116.670	1.055.619	2.172.289
3	2012	1.130.132	1.069.262	2.199.394
4	2013	1.135.234	1.097.435	2.232.669
5	2014	1.154.982	1.095.138	2.250.120
6	2015	1.166.478	1.107.101	2.273.579

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Karawang 2015

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang yang tertera pada tabel di atas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dalam setiap tahunnya signifikan cepat dan tak terkendalikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016.

DPPKB Kabupaten Karawang mempunyai peran posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan melaksanakan kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana.

DPPKB memiliki strategis dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Karawang yaitu Karawang Yang Mandiri, Adil Dan Makmur. Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut. DPPKB memiliki tujuan yang akan dicapai selama ukuran waktu 2016-2021 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Untuk mengoptimalkan tujuan dan sasaran tersebut yang akan dicapai perlu dijabarkan kedalam visi dan misi DPPKB Kabupaten Karawang yaitu “Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas”.

Program KB sebagai kegiatan medis seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB serta terdapat berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, serta terdapat juga pelayanan untuk masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Program KB ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk menahan atau meminimalisir angka kelahiran serta mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk.

Kondisi saat ini, Kabupaten Karawang mengalami peningkatan tinggi pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang yang cukup tinggi yaitu 1,76 % dari total jumlah penduduk 2,2 juta jiwa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari DPPKB mengatakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya minat masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana mengalami penurunan, Kabupaten Karawang menjadi incaran bagi para pencari pekerjaan arus urbanisasi yang datang ke Karawang.

Fenomena pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang setiap tahun selalu mengalami peningkatan secara signifikan maka menarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang analisis strategi terhadap program KB yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Karawang. Menurut Bryson (2005:189) strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya. Strategi dapat di pahami sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya.

TINJAUN PUSTAKA

Fred R David (2004:5) memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan manajemen strategik sebagai ilmu mengenai dari tahapan perumusan, tahapan pelaksanaan serta tahapan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategis memfokuskan pada tiga hal penting yaitu, pertama tahapan

perumusan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka dengan mengembangkan alternatif-alternatif strategi yang akan diadopsi. Kedua, pelaksanaan strategi meliputi penentuan operasional, kebijakan organisasi serta mengalokasikan sumber-sumber daya untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Ketiga, tahapan evaluasi dari strategi yang telah dijalankan yang berkaitan dengan capaian yang telah dihasilkan baik mengukur kinerja individu maupun mengukur organisasi serta mengambil kebijakan untuk memperbaiki dari hasil evaluasi.

Bryson (2005:55) mengajukan tahapan dalam perencanaan strategis dapat ditempuh dalam delapan tahapan yaitu, 1. memprakarsai dan menyepakai suatu proses perencanaan strategis, 2. Mengidentifikasi mandat organisasi, 3. Memperjelas misi dan menilai organisasi, 4. Menilai lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, 5. Menilai lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, 6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. 7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, 8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Dari delapan tahapan yang dikemukakan oleh Bryson mengarah pada tindakan, hasil dan evaluasi dalam organisasi. Teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson menjadi teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori perencanaan strategis diperuntukan bagi organisasi non profit atau instansi pemerintahan.

Delapan tahapan langkah perencanaan strategis diatas merupakan hasil kerja secara kolektif dari tindakan, hasil dan evaluasi. Sementara dalam penelitian ini menganalisis terhadap strategis dari delapan tahapan tersebut tidak akan dilakukan analisis secara keseluruhan melainkan hanya beberapa tahapan saja yang disesuaikan dengan fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya. Identifikasi misi dan mandat organisasi yang berkaitan dengan yang telah ditetapkan dalam legislasi atau undang-undang yang menjadi dasar secara yuridis bagi keberadaan organisasi publik. Sedangkan misi sebagai pernyataan tentang tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk program atau pelayanan yang diberikan.

Analisis lingkungan internal berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta aspek-aspek yang membantu pencapaian misi dari mandat organisasi diantaranya, sumber daya manusia dan sumber anggaran. Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) menegaskan bahwa sumber daya manusia sebagai potensi secara manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Hasibuan (2000:3) mengategorikan SDM dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas mencakup kemampuan fisik maupun non fisik seperti kecerdasan, mental, skill, pendidikan dan pengalaman, sementara aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia. Keban (2002:40) menjelaskan bahwa kajian tentang aspek anggaran sejauhmana ketersediaan

anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi pemanfaatan secara efisien. Dapat dipahami bahwa ketersediaan anggaran bagi organisasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi kelancaran aktivitas organisasi.

Analisis lingkungan eksternal yang meliputi indentifikasi dari lingkungan diluar organisasi seperti perkembangan dari faktor politik dan sosial. Salusu (1996:321) menyatakan dalam manajemen strategis terdapat aspek politik yang perlu diperhatikan dalam perkembangan perubahan atas undang-undang terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup dan misi dari organisasi dari dimensi lokal, dimensi nasional maupun dimensi global. Maka dari itu, perhatian terhadap situasi politik yang sedang berkembang diperlukan guna untuk menyesuaikan kegiatan atau kebijakan dengan perkembangan politik. Aspek sosial menurut Mardiasmo (2002:3) menyatakan aspek sosial hal yang penting tentang kergaman suku, ras, agama, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat. Selain aspek politik, aspek sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen organisasi sehingga perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

METODE

Penelitian ini menganalisis strategi program KB di DPPKB Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan kualitatif di dalam pengumpulan, pengelolaan dan analisa datanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam pelaksanaan program KB. Selain itu, data sekunder yang diperoleh melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana di DPPKB Kabupaten Karawang. Pengelolaan data dilakukan dengan mengikuti tahapan dari konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Norman (2009:591-592) yakni pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil analisa data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian dianalisis berdasarkan pada konsep strategi dari Bryson (2005:189) yakni indentifikasi misi dan mandat organisasi, menilai lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, menilai lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman. Kemudian, ketiga kategori analisa data disajikan sebagai hasil penelitian dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Program KB di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang

Program pembangunan nasional, Program Kependudukan, KB mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan pada undang-undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan Keluarga Berencana adalah *“upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.”*

Pembangunan kependudukan pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia pada tingkat individu dengan tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Akan tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Kondisi saat ini terjadinya revitalisasi kelembagaan yang dilakukan oleh BKKBN untuk di tingkat Kabupaten atau Kota, dimana pada saat ini BKKBN tingkat Kabupaten dan Kota kebanyakan bergabung dan melebur kedalam beberapa instansi.

Seperti halnya di Kabupaten Karawang revitalisasi organisasi yang semulanya BKBPP telah berganti menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Perubahan kelembagaan ini tentunya memberikan dampak terhadap kinerja baik secara teknis maupun strategi pelaksanaan program KB pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Strategi DPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang. Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil temuan penelitian yang menggabungkan data hasil temuan di lapangan dengan dasar operasioanal yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam menginterpretasikan hasil temuan yang berjudul Analisis Terhadap Strategi Program KB DPPKB Kabupaten Karawang.

Pada penelitian ini terdapat tiga aspek yang digunakan untuk mendeskripsikan dan analisis strategi program KB di DPPKB Kabupaten Karawang. Aspek-aspek tersebut dari dimensi perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson yang terdiri dari Identifikasi Misi dan Mandat Organisasi, analisis Lingkungan Internal dan analisis Lingkungan Ekternal. Maka berikut ini adalah temuan peneliti di lapangan.

Identifikasi Misi Dan Mandat Organisasi Terhadap Strategi Program KB di DPPKB Kabupaten Karawang.

Mandat organisasi adalah apa yang telah ditetapkan dalam legislasi atau undang-undang yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan organisasi publik. Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang akan diwujudkan dalam bentuk program atau pelayanan yang diberikan. Misi digunakan untuk mengetahui alasan dibentuknya suatu

organisasi serta tujuan yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya organisasi tersebut. Dalam perencanaan strategis, pemahaman terhadap mandat merupakan hal yang sangat penting agar keputusan yang dibuat tidak menyimpang dari mandat.

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan dari program KB di Kabupaten Karawang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

DPPKB Kabupaten Karawang setiap tahun menyusun rencana kerja disusun secara sistematis dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen program kerja tahunan, sebagai acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Karawang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut DPPKB Kabupaten Karawang telah menyusun dan menyepakati rencana kerja tahunan yang merupakan hasil kerja yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan seluruh staff DPPKB Kabupaten Karawang. Oleh karenanya sebagai dasar secara yuridis bagi pelaksanaan teknis pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang.

DPPKB Kabupaten Karawang kebijakan program KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang dapat diukur tingkat keberhasilan tersebut dengan mandat organisasi yang telah ditetapkan secara yuridis. Dengan adanya Renstra DPPKB Kabupaten Karawang sebagai mandat organisasi. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan dalam mandat organisasi DPPKB Kabupaten Karawang sudah tercermin Renstra sebagai acuan pedoman teknis dalam pelaksanaan program KB sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan sumber data dokumen dari Renstra yang menjadi strategi dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan program KB sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada aturan hukum menjadi dasar bagi DPPKB Kabupaten Karawang periode 2016-2020 sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa Negara menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan sumber data diatas, DPPKB Kabupaten Karawang dalam menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat dalam program KB berdasarkan pada aturan undang-undang. Hal ini sudah mencerminkan dari identifikasi misi dan mandat organisasi yang dikemukakan oleh Brysin dalam perencanaan strategis memiliki acuan secara yuridis legislasi yang mengatur tentang pelaksanaan program KB.

Analisis Lingkungan Internal Antara Kekuatan Dan Kelemahan Terhadap Strategi Program KB di DPPKB Kabupaten Karawang.

Analisis terhadap lingkungan internal berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta aspek-aspek yang membantu atau merintangai pencapaian misi dan mandat organisasi di tentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Anggaran. Sulistiyani & Rosidah (2003:9) mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik, sedangkan sumber daya non manusia terdiri atas sumber daya alam (*natural resources*), modal, mesin, teknologi, material, dan lain-lain. Sumber daya manusia merupakan kata kunci keberhasilan dari pelaksanaan program KB.

Berkaitan dengan sumber daya manusia di DPPKB Kabupaten Karawang dapat dilihat dari struktur pendidikan dari jumlah angka ketenagakerjaan yang ada di DPPKB Kabupaten Karawang berdasarkan dari sumber data Renstra DPPKB Kabupaten Karawang pada 2016-2021 jumlah pegawai berjumlah 108 terbagi dari beragam golongan pejabat PNS di DPPKB Kabupaten Karawang sudah menunjukkan jumlah yang cukup baik untuk menjalankan tugas dan fungsi dari DPPKB.

Komposisi pegawai di DPPKB bekerja sesuai dengan spesialisasi tugas dan fungsi. Untuk memahami secara mendalam kebijakan program KB harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan dari perencanaan strategis. Berdasarkan tingkat pendidikan DPPKB Kabupaten Karawang cukup tinggi terdapat variasi pendidikan yang beragam terutama (S1) di DPPKB tinggi berjumlah 54. Selanjutnya, sumber daya anggaran merupakan bagian terpenting bagi aktivitas organisasi. Hal ini dipertegas oleh

Keban (2002:40) menyatakan bahwa ketersediaan anggaran sebagai faktor pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemanfaatan ketersediaan anggaran secara efisien.

DPPKB Kabupaten Karawang pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 21.714.519.109 dengan realisasi anggaran per 30 Desember 2018 sebesar Rp. 19.497.054.965 (89,79%). Dengan rincian realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.413.364.696 (84,22%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 15.083.690.269 (91,56%). Secara khusus sumber anggaran program KB antara realisasi dan target sudah berjalan dengan baik mencapai 90,44%. Penggunaan ketersediaan anggaran di DPPKB Kabupaten Karawang sudah efisien.

Dari uraian analisis lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan dari aspek SDA dan Sumber anggaran. Dalam pandangan peneliti aspek SDA di DPPKB Kabupaten Karawang sudah cukup baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dipahami dari data uraian di atas angka ketenagakerjaan dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di DPPKB Kabupaten Karawang. Maka dari itu, aspek SDA terkonfirmasi bahwa DPPKB Kabupaten Karawang dalam menjalankan program KB didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas. Hal ini senada yang disampaikan oleh Hasibuan mengategorikan aspek kualitas mencakup kemampuan, kecerdasan, mental, skill, pendidikan dan pengalaman sedangkan aspek kuantitas mencakup ketersediaan jumlah SDM.

Menurut pandangan peneliti ketersediaan dana bagi suatu organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelancaran aktivitas organisasi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan didukung oleh ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan program KB. Dengan ketersediaan anggaran yang cukup Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan tingkat Nasional yang menjadi indikator dari penilaiannya adalah komitmen pemerintah daerah dalam memberikan anggaran bagi pelaksanaan program KB sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Analisis Lingkungan Internal Antara ancaman dan Peluang Terhadap Strategi Program KB di DPPKB Kabupaten Karawang.

Analisis ini meliputi identifikasi terhadap kecenderungan dari perkembangan faktor politik dan sosial. Strategi program KB yang diselenggarakan DPPKB Kabupaten Karawang sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan eksternal yang berkaitan dengan aspek politik dan aspek sosial. DPPKB Kabupaten Karawang mempunyai peran posisi yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB serta ketahanan dan

meningkatkan kapabilitas sumber daya yang bermutu. Salusu (1996:321) memberikan pandangan bahwa manajemen strategis harus memperhatikan aspek politik terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan ruang lingkup dan misi organisasi. Penyebaran penduduk yang kurang merata ini disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda dari setiap daerah.

Selain itu, lonjakan arus urbanisasi di Kabupaten Karawang yang mengalami peningkatan signifikan informasi dari Disdukacatpil dan BPS Kabupaten Karawang pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tertera pada tabel di berikut ini:

Tabel. 5.5
Jumlah Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karawang Periode 2010-2015

No	THN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2010	1,102,825	1,041,360	2,144,185
2	2011	1.116.670	1.055.619	2.172.289
3	2012	1.130.132	1.069.262	2.199.394
4	2013	1.135.234	1.097.435	2.232.669
5	2014	1.154.982	1.095.138	2.250.120
6	2015	1.166.478	1.107.101	2.273.579

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Karawang 2015

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya disebabkan ternyata migrasi arus urbanisasi yang tidak bisa dikendalikan serta angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran total (TFR) adalah rata-rata 3 jumlah yang dilahirkan hidup seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya. Sampai saat ini, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) pada tingkat nasional masih cukup tinggi yaitu berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2014 masih berada di angka 2-3 yaitu 2,42. Artinya Indonesia rata-rata memiliki tiga hingga empat anak untuk setiap wanita yang masih pada masa reproduksinya.

Program KB merupakan program yang lebih menekankan pada peningkatan pemahaman, kesadaran dan kemandirian masyarakat tentang program kependudukan dan keluarga berencana melalui promosi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Selain itu juga program KB juga harus menyesuaikan dengan lingkungan eksternal faktor sosial. Siagian (2000:73) menyatakan bahwa faktor sosial yang perlu diperhatikan adalah keyakinan, sistem nilai dan gaya hidup masyarakat. Masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sesuai dengan keyakinan dan gaya hidup masyarakat.

Berkaitan dengan program KB masyarakat banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan kemampuan gaya hidup untuk mengikuti dari program KB tersebut.

Kelahiran sangat diperlukan namun jumlah kelahiran yang harus dapat dikendalikan dengan cara memberikan pemahaman tentang program KB. Program KB sangat berkaitan dengan sistem keyakinan dan gaya hidup. Oleh karenanya, penyuluhan dan pemberian informasi-informasi mengenai KB perlu dilakukan secara luas kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Jadi disimpulkan bahwa alasan masyarakat untuk ber-KB alasan sosial mengenai persepsi untuk mengikuti program KB bagi kesehatan ibu dan anak. Jika seseorang ibu tidak menjaga jarak kehamilan dan kelahiran, maka ibu akan kehilangan kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh pasca melahirkan serta merawat dan menyusui bayinya agar perkembangan dan pertumbuhan bayi tersebut maksimal.

Dari uraian analisis lingkungan eksternal dari aspek Politik dan sosial. Dalam pandangan peneliti aspek politik pelaksanaan program KB di DPPKB Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik mengatasi tingkat angka urbanisasi atas perubahan kebijakan dan kesempatan kerja. Berkaitan dengan program KB akan memiliki keterhubungan dengan arus urbanisasi yang sangat tinggi karena urbanisasi merupakan alasan tingginya pertumbuhan penduduk. Bentuk perubahan aturan yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Dengan adanya pembagian antara masyarakat lokal 60% sementara masyarakat diluar Karawang 40% yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Atas adanya perubahan tersebut akan berimplikasi pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang akan menjadi incaran para pencari kerja.

Implikasinya angka pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Karawang di pengaruhi oleh arus urbanisasi. DPPKB Kabupaten Karawang sebagai pelaksana program KB untuk masa yang akan datang harus merumuskan strategis yang futuristik untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan lingkungan eksternal dalam aspek politik. Dalam perspektif peneliti Lingkungan eksternal dalam aspek politik saat ini belum memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi angka pertumbuhan yang diakibatkan oleh urbanisasi untuk mencari kerja di Karawang. Kabupaten Karawang harus ramah pada pendatang yang mencari pekerja dan memberikan kenyamanan pada investor untuk menanamkan modal, Kabupaten Karawang harus merumuskan dan menyusun kebijakan strategi humanisitik rasional dan efektif yang berkaitan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

SIMPULAN DAN SARAN

Program KB telah dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang sudah mencerminkan identifikasi misi dan mandat organisasi yang dikemukakan oleh Bryson dalam perencanaan strategis memiliki acuan secara yuridis legislasi yang mengatur tentang pelaksanaan program KB tercantum dalam Renstra DPPKB Kabupaten Karawang periode 2016-2021. Program KB yang telah dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang sudah didukung oleh lingkungan internal yaitu SDM dan anggaran dana. Dalam SDM sudah terkonfirmasi dengan baik DPPKB Kabupaten Karawang dalam menjalankan program KB didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas.

Ketersediaan sumber anggaran program KB merupakan salah satu syarat mutlak bagi kelancaran aktivitas organisasi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Program KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Program KB yang telah dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu aspek politik. Dalam perspektif peneliti Lingkungan eksternal dalam aspek politik saat ini belum memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi angka pertumbuhan yang diakibatkan oleh urbanisasi untuk mencari kerja di Karawang. Aspek sosial sudah cukup berjalan dengan baik masyarakat untuk ber-KB alasan sosial mengenai persepsi, keyakinan dan kemampuan ekonomi untuk mengikuti program KB bagi kesehatan ibu dan anak.

Saran

Kabupaten Karawang harus merumuskan dan menyusun kebijakan strategi yang berlandaskan pada humanistik, rasional dan efektif yang berkaitan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. & David W Young, 2003. *Managemen Control in non profit Organization*, 7th Ed. Mc.Graw-Hill
- Bryson, John M. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Edisi Terjemahan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bryson, John. M. & Roering, William. D. 1987. *Applying Private-Sector Strategic Planning in the Public Sector*. *Journal of the American Planning Association*
- Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta : Salemba Empat
- Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendidikan Non Sekolah*, Muhammadiyah University Press
- Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Osborne, David, and Peter Plastrik. 1997. *Banishing Bureaucracy, The Five Strategies For Reinventing Government*, terjemahan : *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Alih Bahasa: Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Penerbit PPM.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik an Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara
- Sulistiyani, Ambar T. Dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta, 2011.

Dokumen

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa Negara menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sumber Lainnya:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>

<https://regional.kompas.com/read/2018/06/21/17225731/tiga-tahun-terakhir-urus-urbanisasi-di-karawang-tak-terkendali>.

<https://regional.kompas.com/read/2018/06/21/17225731/tiga-tahun-terakhir-urus-urbanisasi-di-karawang-tak-terkendali>.